

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis perkembangan dan faktor yang mempengaruhi realisasi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah triwulan I tahun 2012 sebesar 128,3%, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar (41,9%), pada tahun 2014 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif yaitu sebesar (22,5%). Pada triwulan II belanja daerah tahun 2012 sebesar 66,7%, pada tahun 2013 mengalami penurunan (19,6%), sedangkan tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan (5,3%,). Pada triwulan III belanja daerah tahun 2012 sebesar 113,6%, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar (0,9%) sedangkan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 36,7%. Pada triwulan IV belanja daerah tahun 2012 sebesar 52,1%, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan negatif pertumbuhan (1,9%) sedangkan tahun 2014 mengalami peningkatan atau pertumbuhan positif sebesar 22,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja daerah maupun belanja tidak langsung dan belanja langsung pada triwulan I - IV tahun 2012-2014 mengalami fluktuatif atau peningkatan maupun penurunan. Oleh karena itu, dari analisis ini menunjukkan perkembangan

yang tidak stabil setiap triwulan terhadap belanja daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi belanja daerah tahun 2013 dan 2014 yaitu:

- a. Pada tahun 2012 komponen belanja tidak langsung mengalami peningkatan dengan jenis belanja hibah yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan komponen belanja tidak langsung lainnya. Sedangkan belanja langsung komponen yang mengalami peningkatan yaitu belanja barang dan jasa.
- b. Pada tahun 2013 komponen belanja tidak langsung mengalami peningkatan dengan jenis belanja hibah yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan jenis belanja tidak langsung lainnya. Sedangkan belanja langsung komponen yang mengalami peningkatan paling tinggi yakni belanja barang dan jasa.
- c. Pada tahun 2014 komponen belanja tidak langsung mengalami peningkatan dengan jenis belanja hibah yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan jenis belanja tidak langsung lainnya. Sedangkan belanja langsung komponen yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah belanja barang dan jasa.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan pertumbuhan realisasi belanja daerah yang tidak stabil per triwulan dengan cara memaksimalkan pengeluaran berupa belanja daerah per triwulan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Dengan adanya peningkatan jumlah belanja daerah dari tahun ke tahun, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memanfaatkan anggaran yang ada sebaik mungkin dan lebih memperhatikan kebutuhan untuk pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi pertama*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Gill, 1983. *Masalah Pokok Yang Harus Di Hadapi Untuk Mencapai Pertumbuhan*. Pengantar *Ekonomi Makro & Mikro*, BPFE, Yogyakarta
- Jhingan, 1996. *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali press . Jogjakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Todaro, 1999. *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah*. ekonomi perencanaan dan pembangunan PT. raja grafindo pustaka. Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2001, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, Faried. 1991. *Pengantar Ekonomika Makro*. Edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah